STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Indra Pratama
NPP. 33.0925
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: indra24468@gmail.com

Pembimbing: Dr. Asep Hendra, SE, MM
Email: asephy@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Stunting prevalence in Bone Regency has fluctuated sharply and inconsistently met the national target of 14%, falling from 27.8% (2022) to 17.8% (2023) before rising again to 26% (2024), indicating a gap between policy planning and field implementation that previous studies on district-level stunting interventions have not examined using a comprehensive strategic management framework combined with a quantitative SWOT instrument.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the local government's strategy in reducing stunting rates in Bone Regency based on the strategic management framework of Wheelen and Hunger (2012) and to formulate a single, more effective alternative strategy based on SWOT analysis.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with seven key informants, field observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model.* ***Result:*** *The findings show that the local government's strategy covers four stages—environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation of outputs and outcomes—with the main obstacles being suboptimal cross-OPD coordination, limited facilities and infrastructure, and low community nutritional literacy; the IFAS-EFAS matrix places Bone Regency in Quadrant I (coordinate 0.50; 0.35), recommending an Aggressive Growth Strategy that emphasizes strengthened cross-sectoral coordination through the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) and optimization of the role of health workers and Posyandu cadres in building Nutrition-Aware Families.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the local government's strategy in Bone Regency has been structurally well-designed but remains inconsistent in its outcomes, so it is recommended that the Bone Regency Health Office and TPPS strengthen the SO Strategy by maximizing the TPPS coordination mechanism and digital information systems, as well as optimizing the role of health workers and Posyandu cadres through local-food-based nutrition education.*

Keywords: *local government strategy; public health; public policy; strategic management; stunting*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Prevalensi stunting di Kabupaten Bone berfluktuasi tajam dan belum konsisten mencapai target nasional 14%, yaitu turun dari 27,8% (2022) menjadi 17,8% (2023) namun kembali melonjak menjadi 26% (2024), yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan; kesenjangan ini belum banyak dikaji menggunakan kerangka manajemen strategis yang komprehensif dipadukan dengan instrumen SWOT kuantitatif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bone berdasarkan kerangka manajemen strategis Wheelen dan Hunger (2012) serta merumuskan satu strategi alternatif yang lebih efektif berbasis analisis SWOT. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh

informan kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah mencakup empat tahapan, yaitu pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi output dan outcomes, dengan kendala utama berupa belum optimalnya koordinasi antar-OPD, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya literasi gizi masyarakat; matriks IFAS-EFAS menempatkan Kabupaten Bone pada Kuadran I (titik koordinat 0,50; 0,35) sehingga direkomendasikan Strategi Pertumbuhan Agresif yang menekankan penguatan koordinasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan optimalisasi peran tenaga kesehatan serta kader posyandu dalam membangun Keluarga Sadar Gizi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah Kabupaten Bone secara struktural telah dirancang dengan baik namun masih inkonsisten dalam capaiannya, sehingga disarankan agar Dinas Kesehatan dan TPPS Kabupaten Bone memperkuat Strategi SO dengan memaksimalkan mekanisme koordinasi TPPS dan sistem informasi digital, serta mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan kader posyandu melalui edukasi gizi berbasis pangan lokal.
Kata kunci: kebijakan publik; kesehatan masyarakat; manajemen strategis; strategi pemerintah daerah; stunting

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif, menurunkan produktivitas jangka panjang, dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular di usia dewasa (Schneider, 2017). Data terbaru Joint Child Malnutrition Estimates (JME) mencatat bahwa pada tahun 2024 sebanyak 150,2 juta anak di bawah lima tahun mengalami stunting, setara 23,2% dari total anak kelompok usia tersebut (UNICEF/WHO/World Bank, 2025). Angka ini menegaskan bahwa stunting tetap menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan respons terstruktur dan multisektoral.

Di Indonesia, permasalahan stunting telah menjadi prioritas pembangunan nasional sejak lama. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini mendorong pendekatan konvergensi multisektoral yang melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga tingkat desa (Indra & Khoirunurrofik, 2022). Meskipun terdapat penurunan signifikan dari 37% pada tahun 2013 menjadi 21,6% pada tahun 2022, pencapaian target 14% masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks.

Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi angka stunting yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Sulawesi Selatan bergerak dari 27,4% (2022) ke 27,2% (2022) dan kini berada di angka 23,3% (Herald Sulsel, 2025). Kabupaten Bone sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi kedua di Sulawesi Selatan (827.370 jiwa) menghadapi tantangan serupa. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 realisasi angka stunting Bone mencapai 27,8% melampaui target 23,4%; tahun 2023 berhasil turun ke 17,8% melampaui target 21%; namun pada tahun 2024 kembali melonjak ke angka 26% sementara target nasional adalah 14% (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2025). Inkonsistensi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: ketimpangan sumber daya antarpuskesmas, ketidakefisienan pelaksanaan program, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya literasi masyarakat tentang pola asuh dan gizi, serta hambatan aksesibilitas geografis di beberapa wilayah. Penelitian Syafrawati et al. (2023) mengidentifikasi bahwa perbedaan kapasitas kelembagaan dan kualitas data stunting merupakan faktor determinan yang membedakan kabupaten berhasil dan gagal dalam program percepatan penurunan stunting. Sementara itu, Supranoto et al. (2025) menekankan pentingnya sinergi institusional formal dan informal dalam pengelolaan program penurunan stunting di lingkungan terdesentralisasi seperti Indonesia.

Dari perspektif manajemen strategis, Wheelen & Hunger (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi publik dalam menghadapi tantangan kompleks memerlukan proses manajemen strategis yang komprehensif mencakup: (1) pemindaian lingkungan (environmental scanning), (2) perumusan strategi (strategy formulation), (3) implementasi strategi (strategy implementation), dan (4) evaluasi dan pengendalian (evaluation and control). Kerangka ini relevan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam penurunan stunting karena mampu menangkap dinamika internal dan eksternal organisasi secara holistik. Selain itu, analisis SWOT digunakan sebagai instrumen pelengkap untuk merumuskan strategi alternatif yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal (Nurjannah, 2020).

Merujuk pada penelitian Simangunsong et al. (2025) tentang dynamic governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Manggarai, ditemukan bahwa pendekatan tata kelola yang adaptif (thinking ahead, thinking again, thinking across) menjadi kunci keberhasilan penurunan prevalensi stunting. Temuan ini memperkuat urgensi untuk mengkaji strategi pemerintah daerah Kabupaten Bone secara lebih mendalam dan komprehensif menggunakan pendekatan manajemen strategis Wheelen & Hunger.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya strategi pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam menurunkan angka stunting secara konsisten menuju target nasional 14%, sementara penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang menyangkut kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Bone berfluktuasi tajam, yaitu 27,8% (2022), turun signifikan menjadi 17,8% (2023) yang melampaui target 21%, namun kembali melonjak menjadi 26% pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya inkonsistensi antara perencanaan strategi dan implementasi di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengapa strategi yang telah dirumuskan pemerintah daerah belum mampu menghasilkan capaian yang konsisten, dan strategi apa yang lebih tepat dirumuskan untuk mengatasi kondisi tersebut.

Kesenjangan penelitian (research gap) yang melatarbelakangi penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari sisi kerangka analisis, sebagian besar penelitian terdahulu tentang stunting di tingkat kabupaten (Syafrawati et al., 2023; Hamka & Ibrahim, 2025) lebih banyak menggunakan pendekatan faktor pendorong-penghambat atau kolaborasi multisektoral secara umum, tanpa menggunakan kerangka manajemen strategis yang komprehensif seperti Wheelen & Hunger (2012) yang dipadukan dengan analisis SWOT kuantitatif (matriks IFAS-EFAS). Kedua, dari sisi lokus penelitian, penelitian-penelitian terdahulu banyak berfokus pada wilayah di luar Sulawesi Selatan (Sumatera Barat, Manggarai, dan studi tingkat nasional), sementara Kabupaten Bone sebagai kabupaten

dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sulawesi Selatan dan dengan karakteristik fluktuasi stunting yang signifikan belum banyak dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan manajemen strategis. Ketiga, dari sisi pendekatan strategi, penelitian Meher et al. (2023) menyoroti kelemahan pendekatan generik nasional, namun belum memberikan rekomendasi strategi alternatif yang dirumuskan secara sistematis berdasarkan kondisi internal dan eksternal spesifik suatu daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bone sebagai dasar perumusan strategi baru yang lebih komprehensif. Tanpa penelitian ini, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat sehingga perumusan strategi berisiko tidak tepat sasaran, sebagaimana diperingatkan oleh Meher et al. (2023) bahwa pendekatan "one-size-fits-all" yang terlalu generik justru menghambat efektivitas intervensi stunting di tingkat lokal. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) akan kehilangan basis data kualitatif yang dapat menjelaskan akar inkonsistensi capaian, sehingga upaya percepatan penurunan stunting berpotensi terus berjalan stagnan tanpa perbaikan yang terarah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Syafrawati et al. (2023) mengkaji faktor pendorong dan penghambat percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten di Sumatera Barat menggunakan pendekatan kualitatif, menemukan bahwa peran leading sector yang kuat dan kualitas data merupakan faktor kritis keberhasilan. Indra & Khoirunurrofik (2022) meneliti peran dana desa dan kapasitas administratif dalam penurunan stunting di Indonesia menggunakan data agregat tingkat kabupaten, menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berkorelasi positif dengan penurunan prevalensi stunting. Meher et al. (2023) melakukan studi kasus tentang inefektivitas pendekatan lokal dalam penurunan stunting di Indonesia, merekomendasikan penguatan pendekatan berbasis konteks lokal. Simangunsong et al. (2025) mengkaji dynamic governance dalam penurunan stunting di Kabupaten Manggarai menggunakan teori Neo & Chen, menemukan bahwa tiga elemen thinking ahead, thinking again, dan thinking across memengaruhi keberhasilan penurunan stunting. Supranoto et al. (2025) menganalisis penguatan sinergi institusional untuk penurunan stunting di Indonesia terdesentralisasi, menemukan bahwa transisi dari tata kelola paralel menuju kemitraan memperkuat efektivitas program.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi teori yang digunakan, yaitu mengintegrasikan kerangka manajemen strategis Wheelen & Hunger (2012) yang mencakup empat tahapan secara utuh dengan analisis SWOT kuantitatif (matriks IFAS-EFAS), sebuah kombinasi yang belum digunakan secara bersamaan oleh Syafrawati et al. (2023), Indra & Khoirunurrofik (2022), Meher et al. (2023), Simangunsong et al. (2025), maupun Supranoto et al. (2025) yang masing-masing hanya berfokus pada kerangka faktor pendorong-penghambat, kapasitas administratif desa, studi kasus kebijakan generik, dynamic governance, atau transisi tata kelola institusional.

Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan instrumen pengukuran kuantitatif berupa matriks IFAS-EFAS untuk menentukan kuadran strategi secara terukur, berbeda dengan Syafrawati et al. (2023) mengkaji faktor pendorong dan penghambat percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten di Sumatera Barat menggunakan pendekatan kualitatif, menemukan bahwa peran leading sector yang kuat dan kualitas data merupakan faktor kritis keberhasilan. Indra & Khoirunurrofik (2022) meneliti peran dana desa dan kapasitas administratif dalam penurunan stunting di Indonesia menggunakan data agregat tingkat kabupaten, menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berkorelasi positif dengan penurunan prevalensi stunting. Meher et al. (2023) melakukan studi kasus tentang inefektivitas pendekatan lokal dalam penurunan stunting di Indonesia, merekomendasikan penguatan pendekatan berbasis konteks lokal. Simangunsong et al. (2025) mengkaji dynamic governance dalam penurunan stunting di Kabupaten Manggarai menggunakan teori Neo & Chen, menemukan bahwa tiga elemen thinking ahead, thinking again, dan thinking across memengaruhi keberhasilan penurunan stunting. Supranoto et al. (2025) menganalisis penguatan sinergi institusional untuk penurunan stunting di Indonesia terdesentralisasi yang umumnya bersifat kualitatif eksploratif murni atau kuantitatif-statistik tanpa pemetaan posisi strategis organisasi. Dari segi karakteristik objek penelitian, penelitian ini berlokus di Kabupaten Bone sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik fluktuasi stunting signifikan dan konteks kelembagaan-geografis berbeda dari lokus penelitian terdahulu di Sumatera Barat dan Manggarai, sehingga belum pernah dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan manajemen strategis.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi kerangka manajemen strategis Wheelen & Hunger (2012) dengan analisis SWOT kuantitatif (IFAS-EFAS) untuk menghasilkan rekomendasi strategi baru yang berbasis kondisi internal dan eksternal spesifik Kabupaten Bone, sebuah kombinasi pendekatan, lokus, dan luaran (output rekomendasi strategi terukur) yang belum ditemukan secara bersamaan pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan logika berpikir induktif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, dinamika, dan efektivitas strategi pemerintah daerah dalam penurunan stunting, yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui data kuantitatif semata (Creswell, 2017). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena fenomena inkonsistensi penurunan stunting di Kabupaten Bone bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam mengenai bagaimana strategi dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks lokal, yang lebih tepat diungkap melalui narasi dan perspektif informan secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 7 informan kunci yang dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan langsung dalam program penurunan stunting; (2)

observasi lapangan untuk memperoleh gambaran langsung tentang pelaksanaan program di puskesmas dan posyandu; serta (3) studi dokumentasi terhadap laporan program, data pemantauan gizi, dan dokumen kebijakan terkait.

Pemilihan tujuh informan kunci tersebut didasarkan pada teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa masing-masing informan memiliki peran, kewenangan, dan keterlibatan langsung yang berbeda dalam setiap tahapan manajemen strategis penurunan stunting, sehingga secara kolektif dapat memberikan gambaran yang komprehensif dari perspektif pembuat kebijakan, pelaksana teknis, hingga penerima manfaat. Informan kunci penelitian terdiri dari: (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone (drg. H. Yusuf, M.Kes), dipilih karena merupakan pemegang otoritas tertinggi dan koordinator utama TPPS di tingkat kabupaten sehingga memahami arah kebijakan dan strategi secara menyeluruh; (2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Hj. Kartini Abbas, S.ST, M.Kes), dipilih karena bertanggung jawab langsung terhadap perumusan strategi berbasis data lapangan dan program gizi; (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (dr. Kasmawar Abbas, DK, S.Ked), dipilih karena memahami aspek implementasi lintas sektor dan kendala teknis di lapangan; (4) Pengelola Program Gizi (Husnaeny, SKM), dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis intervensi gizi spesifik dan sensitif serta mekanisme koordinasi dengan puskesmas; (5) Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Faridah Tahir, SKM, M.Kes), dipilih karena berperan dalam edukasi dan pendampingan keluarga berisiko stunting di tingkat desa; serta (6-7) dua orang perwakilan masyarakat dari Desa Otting, dipilih karena Desa Otting merupakan salah satu desa lokus stunting di Kabupaten Bone sehingga representasi masyarakat penerima manfaat program diperlukan untuk memperoleh perspektif evaluasi dari sisi outcomes program di tingkat akar rumput.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari pejabat pemerintah (Dinas Kesehatan), tenaga kesehatan (puskesmas dan penyuluh), serta masyarakat (perwakilan Desa Otting), untuk memastikan konsistensi temuan dari berbagai sudut pandang. Kedua, triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara mendalam dengan hasil observasi lapangan dan studi dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dari satu teknik dapat diverifikasi melalui teknik lainnya. Ketiga, member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil reduksi dan interpretasi data kepada informan untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan informan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan mengikuti model interaktif Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2013), yaitu: (1) reduksi data, dengan merangkum, memilah, dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada hal-hal yang relevan dengan empat dimensi manajemen strategis Wheelen & Hunger (2012); (2) penyajian data, dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel matriks IFAS-EFAS serta matriks SWOT agar pola dan hubungan antarfaktor dapat terlihat dengan jelas; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan menarik kesimpulan sementara yang terus diverifikasi melalui triangulasi dan member check hingga diperoleh kesimpulan akhir mengenai strategi pemerintah daerah dan rekomendasi strategi baru berdasarkan kuadran SWOT yang dihasilkan.

Operasionalisasi konsep penelitian menggunakan kerangka manajemen strategis Wheelen & Hunger (2012) dengan empat dimensi analisis: (1) pemindaian lingkungan yang mencakup analisis internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman); (2) perumusan strategi mencakup misi, tujuan, dan alternatif strategi; (3) implementasi strategi mencakup program, anggaran, prosedur, dan koordinasi; serta (4) evaluasi output dan outcomes mencakup capaian program dan umpan balik. Analisis

SWOT kemudian digunakan untuk merumuskan strategi alternatif berbasis kondisi lokal Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan beberapa desa lokus stunting di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Desa Otting sebagai salah satu lokus utama pengambilan data dari unsur masyarakat. Pengumpulan data berlangsung selama dua bulan, yaitu pada bulan September hingga Oktober 2025, yang mencakup tahapan observasi awal pada minggu pertama hingga kedua September 2025, pelaksanaan wawancara mendalam dengan seluruh informan kunci pada pertengahan September hingga awal Oktober 2025, serta pengumpulan dokumentasi program penurunan stunting dan proses member check yang dilakukan pada paruh kedua bulan Oktober 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam penurunan angka stunting menggunakan kerangka manajemen strategis Wheelen & Hunger (2012) yang terdiri dari empat dimensi: pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi output dan outcomes. Selanjutnya, analisis SWOT digunakan untuk merumuskan usulan strategi baru yang lebih efektif.

3.1. Pemindaian Lingkungan (Environmental Scanning)

Pemindaian lingkungan mencakup analisis kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi upaya penurunan stunting di Kabupaten Bone. Dari sisi lingkungan internal, pemerintah daerah memiliki sejumlah kekuatan strategis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone (I-1) menyatakan bahwa "pemerintah daerah telah memiliki kekuatan yang cukup baik, seperti adanya landasan regulasi yang jelas, dukungan program penurunan stunting, serta keterlibatan tenaga kesehatan, puskesmas, dan kader posyandu dalam pelaksanaan program." Hal ini mencerminkan kondisi yang sesuai dengan dimensi pemindaian lingkungan internal yang mencakup analisis kekuatan sumber daya organisasi (Wheelen & Hunger, 2012). Kondisi internal yang menjadi kekuatan (Strengths) meliputi: (a) landasan regulasi yang kuat mulai dari Perpres No. 72/2021 hingga Peraturan Bupati Bone No. 3 Tahun 2020; (b) program kerja yang terstruktur melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS); (c) ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan di puskesmas dan kader posyandu; serta (d) dukungan anggaran dari APBD dan dana desa. Sementara kelemahan (Weaknesses) yang teridentifikasi meliputi: (a) belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam penanganan stunting lintas sektor; (b) keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di beberapa wilayah terpencil; dan (c) belum memadainya sistem integrasi data stunting antarinstansi yang menghambat penetapan sasaran yang akurat.

Dari sisi lingkungan eksternal, terdapat peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan yaitu: (a) dukungan program dan anggaran nasional dalam hal penurunan stunting dari kementerian terkait; (b) modal sosial berupa partisipasi kader posyandu dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesehatan; serta (c) pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi digital untuk pemantauan gizi dan pelaporan stunting. Adapun ancaman (Threats) yang dihadapi meliputi: (a) rendahnya literasi pola asuh masyarakat yang masih menormalisasi kondisi kekurangan gizi; (b) prevalensi pernikahan usia anak dan budaya merokok dalam keluarga yang menghambat pemenuhan gizi optimal; dan (c) hambatan aksesibilitas geografis Kabupaten Bone yang menyulitkan distribusi layanan kesehatan ke wilayah terpencil.

Temuan ini selaras dengan penelitian Syafrawati et al. (2023) yang menemukan bahwa faktor internal berupa kualitas data dan peran leading sector yang kuat, serta faktor eksternal berupa dukungan anggaran yang memadai, merupakan determinan kunci keberhasilan program percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten. Berbeda dengan temuan Meher et al. (2023) yang menemukan kelemahan pendekatan generik nasional, penelitian ini justru menemukan bahwa Kabupaten Bone telah memiliki berbagai regulasi dan mekanisme lokal yang cukup komprehensif, meskipun implementasinya belum konsisten.

3.2. Perumusan Strategi (Strategy Formulation)

Strategi penurunan stunting di Kabupaten Bone dirumuskan berdasarkan data empiris lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (I-2) menjelaskan: "Strategi penurunan stunting dirumuskan dengan melihat data yang ada di lapangan, seperti jumlah balita stunting, ibu hamil berisiko, serta kondisi keluarga yang menjadi sasaran. Data tersebut kami peroleh dari puskesmas dan kegiatan posyandu, kemudian dijadikan dasar dalam menentukan program yang akan dilaksanakan." Pernyataan ini mencerminkan pendekatan evidence-based dalam perumusan strategi yang sesuai dengan prinsip manajemen strategis modern.

Proses perumusan strategi melibatkan multipihak lintas sektor. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (I-3) menyatakan bahwa pihak yang terlibat mencakup Dinas Kesehatan, puskesmas, tenaga kesehatan, serta OPD lain seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, dengan pemerintah desa dan kader sebagai aktor ujung tombak. Strategi yang dirumuskan mencakup dua jalur intervensi utama: (1) intervensi gizi spesifik, yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita, suplementasi vitamin dan mineral, pemantauan tumbuh kembang rutin, serta penanganan balita dengan masalah gizi; dan (2) intervensi gizi sensitif, yaitu edukasi gizi dan pola asuh, sanitasi dan air bersih, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Inovasi dalam perumusan strategi juga mencakup pembentukan tim pendamping yang turun langsung ke desa-desa. I-2 menjelaskan: "Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pembentukan tim pendamping yang turun langsung ke desa untuk melakukan edukasi dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Kami juga mendorong edukasi pengolahan makanan sehat berbasis pangan lokal agar masyarakat dapat memanfaatkan bahan yang ada di sekitar." Pendekatan berbasis pangan lokal ini sejalan dengan rekomendasi Meher et al. (2023) tentang pentingnya adaptasi strategi terhadap konteks lokal dalam mengatasi inefektivitas intervensi generik.

3.3. Implementasi Strategi (Strategy Implementation)

Implementasi strategi penurunan stunting di Kabupaten Bone dilakukan secara terpadu melalui pendekatan konvergensi yang melibatkan seluruh OPD terkait. Pengelola Program Gizi (I-4) menjelaskan mekanisme koordinasinya: "Di tingkat kabupaten, pelaksanaan dilakukan melalui perencanaan program dan koordinasi dengan puskesmas sebagai pelaksana teknis. Koordinasi antar dinas dilakukan melalui pertemuan rutin dan forum lintas sektor seperti Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Di tingkat desa, pelaksanaan lebih banyak dilakukan melalui kegiatan posyandu, pemantauan tumbuh kembang balita, dan pendampingan keluarga berisiko."

Dari aspek dukungan sumber daya implementasi, I-4 menguraikan: "Dari sisi anggaran, pelaksanaan didukung dana dari APBD serta dana desa. Tenaga kesehatan seperti bidan, nutrisionis, serta petugas puskesmas berperan dalam pelaksanaan di

lapangan. Kader posyandu menjadi ujung tombak dalam membantu pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam menjangkau masyarakat secara langsung." Pengawasan program dilakukan melalui pemantauan lapangan oleh tenaga kesehatan, penimbangan rutin di posyandu, serta pelaporan berkala kepada Dinas Kesehatan.

Kendati demikian, implementasi masih menghadapi sejumlah hambatan. I-3 mengidentifikasi bahwa "kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan akses ke wilayah tertentu, kondisi geografis yang cukup menantang, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan gizi keluarga. Keterbatasan dalam integrasi data juga menjadi tantangan dalam menentukan sasaran yang lebih akurat." Temuan ini konsisten dengan penelitian Supranoto et al. (2025) yang menemukan bahwa fragmentasi tata kelola dan hambatan sosiokultural menjadi kendala utama efektivitas intervensi stunting di Indonesia terdesentralisasi.

Dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat, I-6 (warga Desa Otting) menyatakan: "Kalau dilihat sekarang, sudah ada perubahan dibanding dulu, karena sekarang sudah sering ada kegiatan posyandu, pemeriksaan anak, dan pemberian makanan tambahan. Jadi kami bisa lebih tahu kondisi kesehatan anak." Namun I-7 menambahkan bahwa "respon masyarakat masih beragam; ada yang sudah aktif ikut kegiatan posyandu, tapi masih ada yang kurang peduli karena sibuk bekerja atau merasa anaknya baik-baik saja." Respons yang beragam ini menggambarkan tantangan implementasi di tingkat komunitas yang memerlukan pendekatan komunikasi perubahan perilaku yang lebih intensif.

3.4. Evaluasi Output dan Outcomes

Evaluasi terhadap output dan outcomes program penurunan stunting menunjukkan hasil yang beragam. Di sisi output, capaian yang teridentifikasi meliputi: meningkatnya frekuensi kegiatan posyandu, bertambahnya cakupan pemberian PMT, meningkatnya jumlah anak yang dipantau pertumbuhannya, serta terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten yang mengintegrasikan koordinasi OPD. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menunjukkan keberhasilan sementara pada tahun 2023 dengan prevalensi 17,8%, melebihi target nasional 21%, namun diikuti peningkatan mengkhawatirkan menjadi 26% pada tahun 2024.

Di sisi outcomes, dampak jangka pendek yang teridentifikasi mencakup peningkatan pengetahuan masyarakat tentang stunting, meningkatnya partisipasi kegiatan posyandu di beberapa wilayah, dan terbentuknya kesadaran awal tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak. Namun, fluktuasi angka stunting yang masih tinggi mengindikasikan bahwa outcomes jangka menengah dan panjang belum tercapai secara konsisten. I-1 mengakui bahwa "meskipun strategi yang sudah ada telah berjalan semestinya, masih belum sepenuhnya optimal dalam menurunkan angka stunting secara merata."

3.5. Analisis SWOT dan Usulan Strategi Baru

Berdasarkan pemetaan faktor internal dan eksternal, analisis SWOT dilakukan secara kuantitatif melalui Matriks IFAS dan EFAS untuk menentukan posisi strategis Pemerintah Kabupaten Bone.

Tabel 1. Rekapitulasi Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

Variabel	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor

Kekuatan (S)	S1. Landasan regulasi yang kuat	0,20	4	0,80
	S2. Program kerja terstruktur (TPPS)	0,15	3	0,45
	S3. Dukungan pemerintah & SDM kesehatan	0,15	3	0,45
Sub-Total S				**1,70**
Kelemahan (W)	W1. Koordinasi antar OPD belum optimal	0,20	3	0,60
	W2. Keterbatasan sarana prasarana	0,15	2	0,30
	W3. Rendahnya pengetahuan masyarakat	0,15	2	0,30
Sub-Total W				**1,20**
TOTAL	Akumulasi Matriks Internal	1,00		**2,90**

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Sumbu X (Internal) = Sub-Total S – Sub-Total W = 1,70 – 1,20 = 0,50. Selanjutnya berdasarkan Matriks EFAS diperoleh nilai peluang (O) sebesar 1,70 dan ancaman (T) sebesar 1,35. Sumbu Y (Eksternal) = Sub-Total O – Sub-Total T = 1,70 – 1,35 = 0,35. Titik koordinat (0,50; 0,35) menempatkan Pemerintah Kabupaten Bone pada Kuadran I (Aggressive Growth Strategy), menandakan organisasi memiliki kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan untuk meraih peluang eksternal secara agresif.

Tabel 2. Matriks SWOT Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

Faktor Internal ↓ / Eksternal →	**STRENGTHS (S): Regulasi kuat; TPPS terstruktur; SDM kesehatan tersedia**	**WEAKNESSES (W): Koordinasi OPD belum optimal; Keterbatasan sarpras; Pengetahuan masyarakat rendah**
OPPORTUNITIES (O): Dukungan program nasional; Partisipasi kader posyandu; Teknologi informasi	Strategi SO (Pertumbuhan Agresif): 1. Meningkatkan kerja sama lintas OPD berdasarkan dukungan kebijakan nasional. 2. Mengoptimalkan peran nakes dan kader posyandu dalam edukasi keluarga sadar gizi.	Strategi WO (Perbaikan Terencana): 1. Meningkatkan koordinasi melalui dukungan kebijakan nasional. 2. Optimalisasi sarpras melalui program pusat dan sistem digital stunting.
THREATS (T): Rendahnya literasi pola asuh; Pernikahan dini & rokok; Hambatan geografis	Strategi ST (Diversifikasi): 1. Penguatan edukasi kesehatan berbasis tenaga kesehatan profesional. 2. Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan efektivitas di daerah terpencil.	Strategi WT (Defensif): 1. Perkuat koordinasi OPD untuk program terintegrasi menghadapi rendahnya kesadaran masyarakat. 2. Perluasan jangkauan pelayanan lapangan ke wilayah sulit diakses.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

3.6. Diskusi Temuan Utama

Sub-bab ini membahas secara khusus perbandingan antara temuan penelitian ini dengan temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan strategi penurunan stunting di tingkat pemerintah daerah, baik dari sisi kesamaan, perbedaan, penguatan, maupun penolakan terhadap temuan terdahulu.

Sama halnya dengan temuan penelitian Syafrawati et al. (2023) bahwa peran leading sector yang kuat dan kualitas data merupakan faktor kritis keberhasilan program percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, penelitian ini juga menemukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berperan sebagai koordinator utama yang berhasil mengintegrasikan berbagai OPD melalui mekanisme Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Kedua temuan ini saling menguatkan bahwa keberadaan leading sector yang jelas dan berwenang menjadi prasyarat mutlak bagi efektivitas konvergensi program stunting di tingkat daerah, baik di konteks Sumatera Barat maupun Sulawesi Selatan.

Berbeda dengan temuan Indra & Khoirunurrofik (2022) yang menekankan peran dana desa dan kapasitas administratif aparatur desa sebagai determinan utama keberhasilan penurunan stunting di tingkat nasional, penelitian ini menemukan bahwa di Kabupaten Bone, faktor koordinasi lintas OPD di tingkat kabupaten justru menjadi bottleneck utama yang menghambat konsistensi capaian, bukan semata-mata kapasitas di tingkat desa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga determinan keberhasilan program stunting tidak dapat digeneralisasi secara seragam dari satu konteks ke konteks lainnya, dan perlu direspons dengan strategi yang adaptif terhadap kondisi lokal masing-masing kabupaten.

Temuan ini juga sejalan dan sekaligus memperkuat argumen Supranoto et al. (2025) bahwa transisi dari tata kelola paralel menuju kemitraan yang inklusif menjadi prasyarat efektivitas program penurunan stunting di lingkungan terdesentralisasi. Fragmentasi koordinasi yang ditemukan di Kabupaten Bone merupakan bukti empiris konkret di level mikro kabupaten yang memperkuat temuan Supranoto et al. (2025) pada level analisis kebijakan nasional, sehingga penelitian ini menegaskan bahwa tantangan governance yang lebih luas dalam sistem desentralisasi Indonesia memang termanifestasi secara nyata hingga ke tingkat pelaksanaan teknis di daerah, di mana tanggung jawab penurunan stunting terbagi antara berbagai tingkat pemerintahan tanpa mekanisme integrasi yang sepenuhnya solid.

Berbeda dengan temuan Simangunsong et al. (2025) yang menemukan keberhasilan dynamic governance di Kabupaten Manggarai melalui tiga elemen thinking ahead, thinking again, dan thinking across, penelitian ini justru menemukan kondisi yang kontras di Kabupaten Bone, yaitu adanya kesenjangan antara kapasitas governance yang sebenarnya sudah cukup memadai dari sisi regulasi dan struktur kelembagaan (TPPS) dengan konsistensi pencapaian outcomes di lapangan. Temuan kontras ini memperkaya literatur mengenai variasi keberhasilan tata kelola stunting di berbagai daerah terdesentralisasi, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan kerangka tata kelola yang baik secara struktural tidak serta-merta menjamin konsistensi hasil apabila tidak diikuti oleh kapasitas implementasi yang merata di seluruh unit pelaksana teknis.

Hal ini sejalan dengan argumen Indra & Khoirunurrofik (2022) bahwa kapasitas administratif yang belum optimal pada tingkat pelaksana teknis menjadi hambatan utama konsistensi penurunan stunting di Indonesia. Temuan ini memperkuat penelitian tersebut karena penelitian ini menunjukkan secara lebih spesifik bahwa kesenjangan kapasitas tidak hanya terjadi antara level kabupaten dan desa, tetapi juga terjadi secara horizontal antar-

puskesmas dalam satu kabupaten yang sama, sebagaimana terlihat dari variasi tajam prevalensi stunting antarpuskesmas di Kabupaten Bone.

Selanjutnya, temuan penelitian ini juga berbeda dengan temuan Meher et al. (2023) yang menyoroti inefektivitas pendekatan generik nasional dalam penurunan stunting di tingkat lokal. Penelitian ini menemukan bahwa Kabupaten Bone sesungguhnya telah memiliki adaptasi kebijakan lokal yang relatif komprehensif, antara lain melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2020 dan inovasi tim pendamping desa berbasis pangan lokal, sehingga akar permasalahan inkonsistensi capaian stunting di Bone bukan terletak pada kelemahan adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal sebagaimana ditemukan Meher et al. (2023) pada lokus penelitiannya, melainkan lebih pada lemahnya konsistensi koordinasi pelaksanaan lintas sektor dan integrasi data antarinstansi. Dengan demikian, temuan ini menolak generalisasi bahwa inefektivitas penurunan stunting di Indonesia semata-mata disebabkan oleh pendekatan kebijakan yang terlalu generik, karena perbedaan karakteristik objek penelitian dan konteks kelembagaan antara lokus penelitian Meher et al. (2023) dengan Kabupaten Bone menunjukkan bahwa persoalan utamanya dapat pula bersumber dari sisi implementasi dan koordinasi, bukan semata dari rumusan kebijakannya.

Penelitian ini juga memperkaya temuan Syafrawati et al. (2023) mengenai pentingnya kualitas data dalam keberhasilan program stunting. Apabila Syafrawati et al. (2023) menemukan bahwa kualitas data menjadi faktor determinan pembeda antara kabupaten yang berhasil dan gagal secara umum, penelitian ini menemukan secara lebih rinci bagaimana persoalan kualitas data tersebut bermanifestasi secara konkret di Kabupaten Bone, yaitu melalui ketiadaan sistem integrasi data stunting antarinstansi yang menyebabkan penetapan sasaran intervensi menjadi kurang akurat, serta variasi pelaporan yang signifikan antarpuskesmas. Temuan ini memperkuat pentingnya rekomendasi optimalisasi sistem informasi digital sebagai bagian dari Strategi SO yang diusulkan dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, perbandingan temuan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu menegaskan dua hal penting. Pertama, faktor koordinasi kelembagaan dan kualitas leading sector merupakan determinan yang konsisten ditemukan lintas konteks daerah (sejalan dengan Syafrawati et al., 2023, dan Supranoto et al., 2025), sehingga dapat dianggap sebagai faktor yang relatif universal dalam tata kelola stunting di Indonesia. Kedua, determinan spesifik lainnya seperti peran dana desa (Indra & Khoirunurrofik, 2022), keberhasilan dynamic governance (Simangunsong et al., 2025), maupun inefektivitas pendekatan generik (Meher et al., 2023) ternyata bersifat kontekstual dan tidak selalu berlaku sama di setiap daerah, sehingga penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan manajemen strategis yang mengkombinasikan analisis kualitatif mendalam dengan instrumen pengukuran kuantitatif (IFAS-EFAS) untuk menangkap karakteristik unik setiap daerah sebelum merumuskan strategi intervensi stunting yang tepat sasaran.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan tiga faktor penghambat utama yang bersifat sosiokultural dalam implementasi strategi penurunan stunting di Kabupaten Bone. Pertama, resistensi budaya dalam beberapa komunitas yang masih menormalisasi kondisi anak bertubuh pendek sebagai hal yang wajar atau bahkan dianggap “warisan genetik.” Hal ini mempersulit upaya perubahan perilaku masyarakat meski intervensi teknis sudah tersedia. Kedua, konflik prioritas di mana sebagian warga lebih memilih bekerja dibandingkan menghadiri kegiatan posyandu, mencerminkan tantangan dalam mengintegrasikan

program kesehatan dengan dinamika sosial-ekonomi komunitas. Ketiga, kesenjangan kapasitas antar-puskesmas yang signifikan, di mana data pemantauan gizi Agustus 2025 menunjukkan Puskesmas Tellu Siattinge mencatat prevalensi stunting 12,37% sementara beberapa puskesmas lain mencatat angka nol, mengindikasikan variasi kualitas layanan dan pelaporan yang substansial.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam penurunan angka stunting telah berjalan melalui empat tahapan manajemen strategis: (1) pemindaian lingkungan yang mengidentifikasi kekuatan regulasi dan koordinasi serta kelemahan integrasi data dan sarpras; (2) perumusan strategi yang bersifat evidence-based dan melibatkan multipihak lintas OPD; (3) implementasi melalui mekanisme TPPS dengan pendekatan konvergensi dan intervensi gizi spesifik-sensitif; serta (4) evaluasi output dan outcomes yang menunjukkan pencapaian positif pada 2023 namun diikuti kemunduran pada 2024, mengindikasikan inkonsistensi implementasi. Berdasarkan analisis SWOT, Kabupaten Bone berada pada Kuadran I, sehingga strategi baru yang dirumuskan adalah Strategi Pertumbuhan Agresif (Aggressive Growth Strategy) dengan dua rekomendasi utama berbasis Strategi SO: (1) meningkatkan kerja sama lintas sektor antar OPD dalam pelaksanaan penurunan stunting berdasarkan kebijakan dan dukungan program nasional yang ada, dengan memaksimalkan pemanfaatan mekanisme TPPS dan sistem informasi digital; dan (2) mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam membangun Keluarga Sadar Gizi (KSG) untuk pencegahan stunting sejak dini, disertai edukasi gizi berbasis pangan lokal dan pendekatan komunikasi perubahan perilaku yang adaptif terhadap karakteristik budaya setempat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan beberapa desa lokus stunting, sehingga temuan belum merepresentasikan seluruh wilayah Kabupaten Bone secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan waktu dan biaya penelitian membatasi kedalaman eksplorasi di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan melibatkan lebih banyak puskesmas dan desa, menggunakan metode campuran (mixed methods) untuk mengukur dampak kuantitatif strategi, serta mengkaji faktor sosiokultural secara lebih mendalam sebagai penentu konsistensi penurunan stunting di Kabupaten Bone.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, drg. H. Yusuf, M.Kes beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing Dr. Asep Hendra, SE, MM atas bimbingan, arahan, dan dukungan akademik yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada pihak Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah memberikan fasilitas dan dukungan penelitian bagi penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andi Muhammad Syahrul. (2024). Optimalisasi Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Bone. Skripsi, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. Maternal & Child Nutrition, 14(4), e12617. https://doi.org/10.1111/mcn.12617

Creswell, J. W. (2017). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.

Hamka, A. A., & Ibrahim, M. A. (2025). The Effectiveness of Innovation-based Multisectoral Collaboration in Accelerating Stunting Reduction in Indonesia. KnE Social Sciences, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.18502/kss.v9i1.19567

Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). Understanding the Role of Village Fund and Administrative Capacity in Stunting Reduction: Empirical Evidence from Indonesia. PLOS ONE, 17(1), e0262743. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting.

Meher, C., Zaluchu, F., Eyanoer, P. C., Faridah, F., Astuti, Y., & Harwanto, F. (2023). Local Approaches and Ineffectivity in Reducing Stunting in Children: A Case Study of Policy in Indonesia. F1000Research, 12, 222. https://doi.org/10.12688/f1000research.130902.1

Mulyaningsih, T., Mohanty, I., Widyaningsih, V., Gebremedhin, T. A., Miranti, R., & Wiyono, V. H. (2021). Beyond Personal Factors: Multilevel Determinants of Childhood Stunting in Indonesia. PLOS ONE, 16(11), e0260265. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260265

Nurjannah. (2020). Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing: Studi pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah. Jurnal Perbankan Syariah, 1(1), 35–48. https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps

Pasli, I. (2024). Tren Global dan Lokal dalam Penurunan Stunting: Analisis Bibliometrik dari Studi Terpilih. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 16(2), 249–261. https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4763

Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155.

Schneider, E. B. (2017). Stunting: Past, Present, Future. LIDC Research Briefs, London International Development Centre.

Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.

Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Jafa, B. J. (2025). Dynamic Governance in Reducing Stunting in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia. Open Journal of Social Sciences, 13(1), 1–18. https://doi.org/10.4236/jss.2025.131001

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Supranoto, Sasmito, L., Indriastuti, S., Prayitno, H., & Sawir, M. (2025). From Parallel to Partnership Governance: Strengthening Institutional Synergy for Stunting Reduction in Decentralized Indonesia. Social Sciences & Humanities Open, 12, 102051. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102051

Syafrawati, S., Lipoeto, N. I., Masrul, M., Novianti, N., Gusnedi, G., Susilowati, A., Nurdin, A., Purnakarya, I., Andrafikar, A., & Umar, H. B. (2023). Factors Driving and Inhibiting Stunting Reduction Acceleration Programs at District Level: A Qualitative Study in West Sumatra. PLOS ONE, 18(3), e0283739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283739

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNICEF/WHO/World Bank. (2025). Levels and Trends in Child Malnutrition: Key Findings of the 2025 Edition. United Nations Children's Fund, World Health Organization, World Bank Group.

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability (13th ed.). Pearson Education.